



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA DINAS KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT**

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

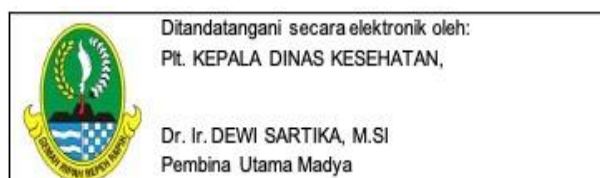
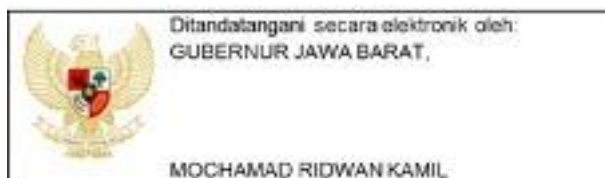
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 28 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	84/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	4,8/1000 KH
		Prevalensi Stunting	23,2%
		Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	90%
		Prevalensi Hipertensi	37,8%
		Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	99,81%
		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	78,84%
		Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Layanan Layad Rawat	66,67%
		Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan menuju universal Health Coverage	95%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 822.086.687.455	APBD
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 191.086.830.366	APBD
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 843.431.029	APBD
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 3.251.648.000	APBD
5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.262.240.460.807	APBD

6. Dukungan Manajemen Satker 01	Rp.	2.343.473.000	APBN
7. Kesehatan Masyarakat	Rp.	17.309.572.000	APBN
8. Dukungan Manajemen Satker 03	Rp.	1.164.978.000	APBN
9. Pelayanan Kesehatan dan JKN Satker 04	Rp.	1.107.518.000	APBN
10. Dukungan Manajemen Satker 04	Rp.	49.000.000	APBN
11. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	48.123.101.000	APBN
12. Dukungan Manajemen Satker 05	Rp.	303.350.000	APBN
13. Pelayanan Kesehatan dan JKN Satker 07	Rp.	466.537.000	APBN
14. Pelayanan Kesehatan dan JKN Satker 12	Rp.	431.070.000	APBN
15. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	431.070.000	APBN
16. Dukungan manajemen Satker 12	Rp.	1.255.660.000	APBN

Bandung, 28 Januari 2021

